

APAKAH MASYARAKAT INDONESIA MEMENTINGKAN IDEOLOGI

Samson Ganda J. Silitonga

Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Email: samson.ganda@unpar.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 12 Juni 2022 Direvisi 29 Juli 2022 Disetujui 23 Agustus 2022	Pengalaman belajar mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila selama bertahun-tahun dalam suasana yang serius dan analitis, telah membuktikan bahwa Ideologi bukanlah pengertian yang mudah dipahami dan gampang diterapkan manusia Indonesia, apalagi diimplementasikan dalam keseharian. Selama 77 tahun sejak Indonesia berdiri, sangat disangsikan, apakah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara dapat dipahami dan terealisasi. Catatan ini mencoba menelusuri beberapa pengertian Ideologi, lalu mengaitkan dengan Pancasila. Tidak dapat tidak, penelusuran juga membicarakan Agama dan Budaya sebagai 2 (dua) entitas melekat dalam masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Pancasila, Ideologi, Indonesia	ABSTRACT <i>The teaching and learning experience of Pancasila Education courses for many years in a serious and analytical atmosphere, has proven that Ideology is not an understanding that is easy to understand and easy for Indonesian people to apply, let alone implemented in everyday life. For 77 years since Indonesia was founded, it is highly doubtful whether Pancasila as the ideology of the nation and state can be understood and realized. This note tries to trace some sense of Ideology, then relates to Pancasila. It cannot be helped, the search also talks about Religion and Culture as 2 (two) entities inherent in Indonesian society.</i>
Keyword: Pancasila, Ideology, Indonesia	

Pendahuluan

Selama Orde Baru, manusia Indonesia takut menghadapi negara. Tetapi itu tidak dapat diartikan bahwa manusia Indonesia juga akan khawatir jika tidak mengaplikasikan Pancasila. Ketakutan manusia Indonesia terhadap negara adalah ketakutan terhadap aparat birokrasi, terutama militer yang berseragam loreng. Selebihnya, ketakutan itu mencuat apabila aparat pemerintah merasa kecewa bila urusan yang diselesaikannya tidak diberi ganjaran hadiah berupa uang atau sogokan.

Dengan demikian, apakah Ideologi satu kebutuhan manusia yang harus terwujud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Lebih spesifik lagi, apakah Pancasila ~ Nilai-nilai yang tertanam ~ dalam diri manusia Indonesia, dapat

diimplementasikan, dan mengapa hal itu tidak terjadi?

Dalam penulisan ini, saya memiliki tujuan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan pada judul, apakah bangsa Indonesia mementingkan Ideologi dengan semua konsekuensinya. Para pembaca akan mengerti dengan mudah dan jelas terkait dengan ideologi yang ada di Indonesia diperhatikan atau tidak. Bila dilihat secara teori, pasti masyarakat mementingkan ideologi Indonesia, namun bila dilihat dari kenyataan apakah seperti yang tercatat pada teori.

Metode Penelitian

Saya akan menelusuri jawabannya melalui beberapa cara kerja atau metode yaitu

How to cite:	Silitonga, Samson Ganda J. (2022). Apakah Masyarakat Indonesia Mementingkan Ideologi. <i>Jurnal Syntax Transformation</i> , 3(8). https://doi.org/10.46799/jst.v2i110.421
E-ISSN:	2721-2769
Published by:	Ridwan Institute

hermeneutika sosial (tafsir), diimbui metode sejarah dan kuantitatif. Data yang saya ambil adalah data lampau yang pernah terjadi atau ada sebelumnya, selain itu saya juga mengambil data dari kehidupan sekarang ini. Tahapan yang saya lakukan berurutan sesuai dengan metode yang saya lakukan (Gibbons, 2002)

Hasil dan Pembahasan

Ideologi berasal dari kata IDE dan LOGOS. Ide berarti gagasan, sedangkan *logos* berarti kata/ kalimat yang otomatis berubah menjadi deskripsi ataupun pengetahuan. Dengan demikian, Ideologi ialah uraian atau penjelasan yang menjadi pengetahuan bersama, dan diaktualkan. Setiap ide harus bisa diwujudkan secara konkret, sebab kalau tidak, sebuah ide bukanlah ide melainkan angan-angan penjual cendol.

Telah banyak buku yang menjelaskan secara luas pengertian Ideologi, antara lain dari Karl Manheim, Jorge Larrain, Karl Marx, Paul Ricoeur dan sebagainya. Berdasarkan uraian mereka, diketahui bahwa Ideologi umumnya dibagi atas 3 (tiga) tujuan, yakni Deskriptif, Positif dan Peyoratif atau Negatif.

Secara Deskriptif, Ideologi bermaksud menjelaskan kenyataan yang berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Misalnya Khatulistiwa atau realitas alam, yang dengan itu manusia menentukan tujuan hidupnya. Realitas itu harus sesuai tujuan hidup dimaksud. Jika manusia tinggal di wilayah Khatulistiwa, dikelilingi lautan dan tanah yang subur, tidak mungkin lagi tujuan hidupnya sesuai dengan manusia yang tinggal di gurun pasir. Dalam keluarga misalnya, dideskripsikan bahwa profesi yang telah bertahan sekian lama ialah dokter, mulai dari eyang, ayah, hingga saudara-saudara. Menjadi aneh jika salah seorang anggota keluarga tersebut memilih jurusan Sosiologi.

Secara Positif, Ideologi bermaksud menjelaskan tujuan hidup manusia. Tujuan hidup memang subyektif atau berbeda-beda pada setiap orang. Tetapi tujuan hidup obyektif juga dapat dirumuskan “Baik”. Menetapkan tujuan hidup

yang baik, sekaligus dengan cara-cara yang baik secara detail, dan mengabaikan hal-hal yang tidak termasuk tujuan baik. Dalam arti barusan, orang sering mangkategorikan bahwa inilah maksud Ideologi sesungguhnya. Pada keluarga dikatakan bahwa keluarga X merupakan keluarga terhormat yang selalu menjaga sikap dalam interaksi dengan orang lain. Maka selanjutnya keturunan mereka harus pula menjaga sikap sebagai keluarga yang layak dihormati.

Secara Negatif, Ideologi adalah kesadaran palsu (*false consciousness*). Misalnya Orde Baru, manusia Indonesia sering mendengar dan menyatakan tujuan Negara ialah “Tinggal Landas”. Pertanyaan: kapankah tercapai? Dapatkah mencapai tinggal landas? Barangkali, itulah kesadaran palsu sebab sebenarnya tidak dapat terwujud, bahkan hingga mati. Hanya sebuah angan-angan, meski tidak dapat disebut angan-angan penjual cendol. Lebih tepatnya: sebuah angan-angan yang terwujud dalam usaha diri sendiri, tanpa dirumuskan atau dipamer pada orang lain. Sebuah keluarga dari klan tertentu akan menjaga “kemurnian” klan tersebut dengan menikahi sesama klan. Tetapi itu sebenarnya bukan jaminan, karena satu keluarga yang menikahi sesama klan justru dapat merusak nama baik klan tersebut.

Ideologi yang berada di tengah masyarakat (antar-individu), tidak selalu disebut *Logi* atau *Logos*. Tetapi sebagai Ilmu, hal itu berupa paham/ Isme sebagai pengetahuan bersama yang mengikat. Misalnya disebut Realisme atau Materialisme. Sedemikian rupa, bisa juga tanpa istilah Isme, seperti agama atau budaya (catatan ini juga menjelaskan mengapa agama dan budaya dikategorikan ideologi) seperti Sundaisme atau Jawaisme

Ideologi pertama-tama pastilah terkait dengan Negara. “Tidak ada negara tanpa ideologi”, demikian adagium yang sering terdengar. Ideologi merupakan instrumen/ *apparatus* yang harus tersedia, bilamana sebuah negara didirikan. Namun, ideologi tidak hanya bersifat *top-down*. Ideologi juga berada di tengah masyarakat yang seolah cair, namun

mengandung sejumlah isyarat yang dikehendaki dan ditentukan bersama.

Salah satu misal ialah Ibuisme/ Bapakisme dan Militarisme. Ibuisme/ Bapakisme dan Militarisme berada di tengah masyarakat Indonesia pada Orde Baru. Ibuisme adalah peran ideal ibu di tengah keluarga, sedangkan Bapakisme merupakan peran ideal bapak di tengah keluarga. Sebutan Militarisme dimaksudkan setiap anggota militer merupakan institusi yang layak dihormati dan tidak mungkin berbuat salah di tengah masyarakat. Pertama-pertama karena peran besar bagi Indonesia (Kemerdekaan dan Percobaan Kudeta 1 Oktober 1965), dan kedua, karena disiplinnya layak ditiru. Pengertian yang dapat diperdebatkan, tetapi sebagai sebuah ideologi perdebatan itu menjadi nihil (Shiraishi, 2001).

Misalnya lagi, seorang Ibu/Bapak menginginkan putrinya menikah dengan jodoh yang berasal dari suku atau agama yang sama. Sekaligus berasal dari tingkat pendidikan/kesarjanaan tertentu. Maka Ibu/Bapak akan menolak atau tidak merestui jika putrinya memperkenalkan jodoh dari latar suku dan agama berbeda, atau tingkat pendidikan berbeda. Ibu/Bapak tersebut sudah memiliki paham sosial yang akan didesakkan pada putrinya, dan paham yang diinternalisasi sudah mengalir, bahkan berkembang secara sosial. Hal itu bukan lagi paham yang dianut secara pribadi, tetapi juga sebuah ideologi.

Setelah dijelaskan pengertian Ideologi dalam masyarakat yang mencair (seolah bukan ideologi), berikut akan dipaparkan beberapa contoh Ideologi yang terkait dengan sejarah dan negara. Saya akan menjelaskan tiga Ideologi berikut, yang pernah sangat menguat sebagai ideologi negara: Merkantilisme, Kapitalisme dan Sosialisme. Lalu akan dijelaskan tiga Ideologi lain yang relevan, yakni Komunisme, Agama dan Budaya.

Merkantilisme

Ideologi ini telah mengemuka sebelum Kapitalisme dan Sosialisme dilahirkan, bahkan

termasuk Ideologi internasional. Mungkin saat itu (ketika Merkantilisme dipraktekkan), manusia belum menyebut sebagai Ideologi *by definition*, tetapi dalam perspektif sekarang harus disebut demikian, karena berbagai tindakan manusia terarah pada pengertian yang dijelaskan Ideologi ini. Dengan kata lain, Merkantilisme merupakan Ideologi yang telah berusia tua, termasuk karena mendahului Kapitalisme.

Secara teknis, Merkantilisme berasal dari kata *Merchant*. Kalau demikian, Ideologi ini merupakan tujuan bernuansa kolektif yang diusahakan oleh Negara, dan sekaligus menggambarkan kesuksesan Negara mensejahterakan masyarakat. Cara yang ditempuh Negara ialah mengumpulkan logam mulia dan menjadi standard kekayaan Negara yang dapat 'dibeli' masyarakat. Tetapi usaha Merkantilisme dapat dilakukan oleh masyarakat, dengan meniru tindakan Negara. Yakni mengumpulkan barang-barang apapun yang menjadi gambaran kekayaan pribadi ataupun keluarga (Heilbroner, 1986).

Jika saya mempunyai sebidang tanah yang seluruhnya ditanami pisang, pada saat panen saya akan mengumpulkan semua pisang saya untuk 'dijual' kepada Negara dan mengubahnya menjadi emas. Tentu saja harus demikian, karena jika tidak segera dijual, pisang segera busuk dan tidak berguna. Lain halnya jika saya menjadi pengusaha besi. Seluruh area di rumah saya menjadi tempat penyimpanan besi, dan saya menyebut diri sebagai orang kaya.

Harus dikatakan bahwa Merkantilisme mendorong Negara melakukan intervensi terhadap wilayah di luar negaranya demi memperbanyak jumlah kebutuhan di dalam negeri. Inilah yang dilakukan Inggris hingga menguasai 2/3 wilayah dunia, dan Belanda melalui VOC (1602-1799). Seperti diketahui, Belanda membubarkan VOC (31 Desember) setelah terjadi perubahan konstelasi Eropa.

Kapitalisme

Adam Smith ditahbiskan sebagai Bapak Kapitalisme, setelah bukunya berjudul *The*

Wealth of Nations terbit tahun 1776. Buku tersebut berbicara tentang bagaimana sebuah negara menjadi kaya dan makmur. Solusi yang ditawarkan bukanlah pembatasan perdagangan, yakni hanya tindakan Negara, tetapi oleh setiap warganegara atau individu. Adam Smith percaya bahwa Individu (bukannya Negara) menjadi kunci maha penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran (melampaui *survive*). Sejauh tiap-tiap individu memiliki kebebasan menjalankan kreatifitas dan perdagangan, maka hidupnya akan ditopang oleh *Invisible Hands* (tangan-tangan yang tidak kelihatan).

Dapat dikatakan bahwa kritik Smith terhadap Merkantilisme berawal dari sebuah pertanyaan mengenai sumber kekayaan bagi orang biasa (awam) jika hanya mencontoh tindakan Negara. “Dari mana contoh itu bisa dikerjakan dengan serupa dan pasti dapat dipertanggungjawabkan?”, ujar Smith. Ini adalah pertanyaan teoritis sekaligus praktis, tetapi pada masa Smith menjadi pertanyaan yang selalu mengambang.

Optimisme Smith memang sempat mendapat pertentangan dari Robert Malthus dan Rikardo, dua intelektual yang mengajukan pertanyaan tentang hukum besi upah dan standar hidup *subsisten* (dari tangan ke mulut). Juga dari John Stuart Mill yang tidak bisa menemukan jawaban diantara kebebasan (*liberty*) dan Sosialisme. Namun seperti kita ketahui, Kapitalisme terus berjalan sebagai Ideologi yang mendunia dan memiliki daya tarik, bahkan padu padan dengan Revolusi Industri maupun sesudahnya.

Smith memang berusaha meyakinkan sekaligus membujuk masyarakat Eropa untuk menerapkan sistem yang diperkenalkannya. Semisal untuk memproduksi anggur terbaik di Skotlandia, petani harus mengeluarkan uang sebesar 30X lipat harga anggur di Perancis. Harga itu menjadi demikian karena impor dilarang. Maka pertanyaan menjadi, “Masuk akalkah jika Negara menciptakan hukum yang melarang import, sekaligus juga membolehkan eksport yang sangat mahal? (Smith, 1776).

Dalam perjalanan selanjutnya, Adam Smith mengidentifikasi tiga unsur penting dalam teorinya: kebebasan (*freedom*), kepentingan diri (*self interests*) dan persaingan (*competition*). Sedangkan *invisible hands* semacam *moral effect* yang harus dijaga dalam diri individu, sekaligus menjaga naluri manusia dari kemungkinan untuk bersikap serakah serta mementingkan ego pribadi (*egoism*).

Dalam buku yang lain (Smith, 1759) Adam Smith juga mengemukakan bahwa manusia perlu menjaga simpati (tepatnya: *natural sympathy*) terhadap individu lain dan hal itu menjadi kekuatan yang melampaui kekayaan dan kesejahteraan. Tetapi jika harus berhadapan dengan *self-interests*, maka timbullah dilema atau kontradiksi, terutama oleh para filsuf Jerman. Mereka menyebutnya *Das Adam Smith Problem*. Tetapi Adam Smith sendiri tidak melihat hal itu sebagai masalah; justru saling melengkapi, sebagai sebuah pandangan sistematis tentang masyarakat liberal. Tahukah Anda mengapa Smith tidak menganggap itu sebagai pertentangan?

Pada bidang pendidikan, Adam Smith menulis demikian (Smith, 1759) “Kalau saja para pengajar itu orang yang waras, tentu dia akan sangat jengkel saat tahu bahwa, saat mengajar mahasiswa, dirinya ternyata membicarakan atau membaca hal-hal yang tidak berguna, atau hal-hal yang sedikit lebih baik ketimbang omong kosong. Tentu dia juga akan jengkel saat tahu bahwa saat menghadiri kuliahnya, mahasiswa menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa mereka mengabaikan, mengejek dan menghina...” “Disiplin akademik dan universitas pada umumnya disusun bukan untuk kebaikan mahasiswa, tetapi demi kepentingan, atau lebih tepatnya, demi kenyamanan sang dosen.”

Pada bidang politik, Smith memang mendukung pemerintahan yang kuat, tetapi tidak terlalu besar. Smith mengingatkan bahwa pemerintah atau Negara membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk membela Negara. Selain itu, Smith juga mendukung sistem hukum yang bisa menjamin hak milik, perjanjian

dan pembayaran utang. Dan juga, Smith mengatakan Negara membutuhkan biaya tinggi untuk membangun infrastruktur, serta membiayai sarana publik seperti pendidikan, perumahan dan sarana sosial lain.

Jika Negara terlalu besar (seperti Indonesia?), akan terjadi pemborosan yang tidak bermanfaat. Selain itu, kemungkinan Negara bisa salah menentukan kebijakan sehingga sia-sia. Pendeknya, Smith minimal memberikan pembelaan pada anggaran berimbang, sekaligus menentang utang publik yang terlalu besar. Pada akhirnya kita tahu bahwa Kapitalisme memang bertumbuh dalam skala yang tidak bisa dikontrol. Pertama-tama di Eropa, kemudian di Amerika Serikat, Asia, Australia, Afrika dan benua-benua lain. Setelah periode mesin uap, kita juga mengenal “Kapitalisme Cetak-mencetak”, sebagai kelanjutan dari penemuan Johan Guttenburg. Dalam hal itu, kita menyaksikan bagaimana Kitab Suci semakin mudah diproduksi lalu dijual pada setiap orang yang merasa membutuhkannya.

Tidak hanya itu, kita tahu bahwa kereta api dan telepon menjadi benda yang jaya pada masanya dan menjadi simbol perkembangan Kapitalisme. Termasuk alat-alat persenjataan (besar - kecil) yang digunakan dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Dekade 1920an, Kapitalisme mengalami kemunduran akibat kelesuan ekonomi (*malaise*) yang parah, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Terjadi setelah Perang Dunia I, depresi disebabkan merosotnya permintaan senjata setelah sebelumnya justru melonjak dalam Perang Dunia I. Selain itu, seperti kita ketahui bahwa pada 1918 dunia dilanda Pandemi *Flu Spanyol*, seperti terjadi saat ini. Ketiga penyebab itu membuat harga-harga barang merosot drastis.

Akibat *great depression* itu, Amerika Serikat menurunkan suku bunga perbankan untuk merangsang individu meminjam uang dan membuat perputaran uang menjadi pulih kembali. Pada saat inilah terjadi Revolusi Industri II, yang mana mesin-mesin buatan *Fort* diadopsi untuk membuat mesin cuci dan barang-

barang teknologi lainnya, termasuk pada perfilman dan industri hiburan. Amerika Serikat berjaya dalam ekonomi, setelah 85% industri otomotif dikuasainya. *Dollar* (\$) menggantikan *Poundsterling* (£) sebagai mata uang utama internasional. Tidak hanya ekonomi, kebudayaan pun berubah setelah pemulihan *great depression* tersebut.

Demikian sekelumit sejarah Kapitalisme yang menjadi pemenang perang-perang ideologi. Dengan kemenangan itu, semua Ideologi yang tidak tumbuh menjadi Ideologi besar, akan menggelayut ke dalam Kapitalisme. Siapapun yang setuju dengan kebebasan pribadi, akan menerima Kapitalisme sebagai bagian hidupnya.

Sosialisme

Pada tulisan terdahulu, telah dijelaskan sejarah dan perkembangan ide Sosialisme. Gagasan ini telah cukup tua, bahkan mendahului Kapitalisme. Tetapi Karl Marx membuat Sosialisme membesar dan menguat, terutama ketika menghadapi Kapitalisme.

Tesis Marx didahului penjelasan yang ‘dipinjam’ dari George William F. Hegel, yakni Dialektika. Menurut Hegel, Tesis akan menghadapi Anti Tesis dan hasilnya adalah Sintesis atau Tesis Baru. Dialektika itu juga terjadi pada Kapitalisme, yakni Sosialisme sebagai Anti Tesis, yang menghasilkan Tesis Baru. Apakah itu masyarakat Sosialis atau Komunis? Dengan demikian, Dialektika tidak hanya terjadi dalam gagasan, tetapi penting untuk melihatnya dalam tindakan manusia.

Menurut Sosialisme, bukan individu tetapi Negara yang berperan mengeksplorasi sumber daya alam, lalu mendistribusikan pada setiap warga. Istilahnya bukan kekayaan, melainkan pendapatan yang menjadi milik anggota masyarakat. Sosialisme melancarkan kritik terhadap kapitalisme, yakni semakin banyaknya buruh yang terlantar, dan jurang antara orang kaya dan orang miskin makin menganga (McVey, 2019). Namun pertanyaannya, siapakah Negara.

Negara bukan aktor tunggal yang aktif pada semua bidang kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa ‘dalam kasus’ Sosialisme, sebenarnya terdapat 3 (tiga) kelas dalam masyarakat, yakni pekerja, manajer dan perencana. Pekerja aktif melakukan produksi, tetapi perencana-lah yang menentukan pekerjaan para pekerja itu, termasuk jumlah, dan pada siapa produksi didistribusikan. Perencana juga dapat menyuap manajer supaya kehendak dan kepentingannya yang dilakukan pekerja. Dengan kata lain, justru perencanalah yang sesungguhnya menguasai alat-alat produksi, bukannya pekerja. Jika demikian, Sosialisme sebenarnya tidak bekerja sesuai sistem dimaksud, atau tidak sesuai *text book*.

Pada 1980, ketika olimpiade Moskwa digelar, Uni Sovyet mengalami ketimpangan ekonomi sangat parah, karena hanya 2,5% masyarakat menguasai 80% sumber produksi dan pendapat. Dapatlah dikatakan bahwa yang dikhawatirkan pada Kapitalisme juga terjadi pada Sosialisme (Becker, 1999). Tetapi para sosialis akan setia pada ajaran Marx.

Di negara-negara Skandinavia, Sosialisme juga diterapkan. Tetapi mengapa pada negara-negara itu masyarakat sejahtera? Jawaban harus diberikan: pada negara-negara Skandinavia, etos kerja sangat tinggi, dan berbeda dari Uni Sovyet. Justru ketika Negara mengurangi pengaruhnya, ekonomi menjadi lesu. Ini terjadi pada dekade 1960an hingga 1970an. Untuk mengimbangi pendapatan yang merata, pajak (khususnya kesehatan) harus naik. Inilah yang terjadi di sana, namun menjadi terbalik jika dibandingkan dengan Uni Sovyet (Dullien et al., 2013).

Pertanyaan ini harus pula dilontarkan: apakah Sosialisme harus direbut dari kaum Kapitalis melalui Revolusi (biasanya dengan kekerasan) atau Demokrasi. Pertanyaan tersebut dijawab Arief Budiman lewat disertasinya di Harvard (1980), dengan mengacu pada peristiwa Allende di Chile (Wolf, 2007). Menurut Budiman, Chile sebenarnya hampir berhasil menerapkan nasionalisme pada semua perusahaan negara yang dimiliki. Tetapi Perang

Dingin ‘memaksa’ Amerika Serikat menggulingkan Salvador Allende dan menggantinya dengan Augusto Pinochet. Dengan kata lain, Revolusi (kekerasan) bukan satu-satunya jalan yang dapat dipilih kaum sosialis.

Dalam konteks Indonesia, Soekarno mengatakan bahwa Sosialisme *a la* Indonesia terwujud dalam Marhaenisme. Boleh jadi Soekarno mengatakan itu karena tak menyukai Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) bentukan Tan Malaka, juga tidak menyukai PSI (Partai Sosialis Indonesia) bentukan Sutan Sjahrir yang kebarat-baratan. Meski begitu, Marhaen memang merupakan gambaran kelompok sosial marginal yang pernah ditemui Soekarno pada saat kuliah di Bandung. Seorang Marhaen tidak memiliki tanah garapan, sekaligus tidak mempunyai alat-alat produksi sendiri seperti cangkul dan linggis. Tetapi Marhaen dapat diajak bergerak dan berjuang untuk rakyat untuk merdeka.

Komunisme

Dalam uraian mengenai Komunisme, Karl Marx menyebut bahwa sejarah menakdirkan Komunisme sebagai hasil akhir peradaban. Tetapi uraian itu dibantah oleh Francis Fukuyama dengan mengatakan bahwa hasil akhir tersebut ialah Kapitalisme (Turner, 2003). Apakah ramalan Marx tidak akan terbukti, atau hanya sekadar utopia.

Teori Marx tentang Komunisme mengatakan, menurut penjelasan **Materialisme Dialektika Historis** hukum dasar perkembangan masyarakat ditentukan oleh sistem produksi. Dengan kata lain, sistem produksilah yang menentukan hajat masyarakat dan perkembangannya. Inti persoalan ialah cara memenuhi kebutuhan hidup atau proses ekonomi, dan bukan sebaliknya. \Pada perkembangan itu, tahap-tahap formasi sosial berubah-ubah, yang dimulai dari masyarakat komunal primitif atau komunis purba. Selanjutnya adalah perbudakan, kemudian masyarakat feodal, lalu menjadi masyarakat kapitalis. Akhirnya, masyarakat berubah menjadi

Komunis. Dengan demikian, masyarakat akan berkembang ke dalam 5 (lima) tahap. Dalam contohnya, Marx menyebut masyarakat Jawa, meskipun Marx tidak pernah mengunjungi Pulau Jawa (Tucker, 1978).

Pada masyarakat primitif, alat produksi masih sangat sederhana dan bukan milik pribadi. Hasil produksi juga milik bersama. Tetapi seiring munculnya alat-alat produksi bersama (seperti besi, logam dan tembaga), hasil produksi juga bertambah dan manusia mulai mengenal mekanisme pasar. Pada tahap selanjutnya, muncullah orang-orang kaya yang memiliki alat-alat produksi. Mereka yang tidak memiliki peralatan produksi, hanya mempunyai tenaga. Pada situasi inilah muncul perbudakan, yang mana para pemilik budak berusaha mencapai keuntungan besar dengan cara memaksa para budak bekerja tetapi dengan upah yang minim.

Lalu pada masa feodalisme, budak-budak tidak lagi dianggap sebagai budak tetapi sudah menjelma menjadi pekerja (buruh dan tani) yang siap dieksploitasi. Sementara yang lebih kuat menjelma menjadi tentara atau prajurit yang siap mengawasi pekerja. Di Indonesia, periode ini dapat kita lihat pada masa Kolonialisme, khususnya tanam paksa yang membuat Nusantara menjadi amparan tanah penuh genangan keringat dan air mata. Seiring itu, feodalisme memang merajalela karena para bupati dan bangsawan ikut menggagahi masyarakat yang tetap miskin. Di Banten, kita mengenalnya lewat novel *Multatuli* atau Edward Douwes Dekker, Max Havelaar.

Pada masyarakat Kapitalis, inti pekerjaan mereka ialah eksploitasi dan alienasi. Eksploitasi dimaksud ialah pada majikan maupun buruh. Majikan mengeksploitasi buruh, dan buruh juga melakukan hal yang sama terhadap kapasitas produksi. Pemilik (*owner*) meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pada akhirnya, Kapitalisme tidak mampu lagi bertahan sementara buruh dan pekerja semakin banyak dan tidak terkendali. Begitu pula dengan SDM buruh atau pekerja semakin tinggi, semakin disiplin dan bersatu. Dengan demikian, yang menghancurkan

Kapitalisme ialah dirinya sendiri dan negara pun lenyap. Karl Marx lantas menyerukan, “Bersatulah para buruh sedunia !” Tetapi sampai detik ini kelihatan Komunisme belum lahir. Kita masih hidup pada masa Kapitalisme dan sisa-sisa feodal.

Dari uraian di atas, besar kemungkinan jawaban atas pertanyaan tadi ialah karena cara berpikir Indonesia masih dipengaruhi lima tahapan perkembangan masyarakat. Namun apabila kita simak, kelima tahap itu tidak menjadi menjadi perhatian sepenuhnya, terutama dalam kompleksitas maupun detailnya. Sehingga secara faktual, pertanyaan di atas merupakan bagian dari dugaan perasaan atau sentimen, bukannya dapat dibuktikan secara rasional (Pipes, 2003). Lagipula, Agama masih menjadi konsentrasi masyarakat Indonesia.

Demokrasi dan Nasionalisme

Dalam uraiannya tentang perkembangan Demokrasi, John Markoff menjelaskan pasang surut Demokrasi. Sempat berjaya sebagai sistem yang dipercaya pada Yunani, Demokrasi kemudian seolah tenggelam selama berabad-abad, lalu lahir kembali ketika Dinasti Romp memaksa dinasti Inggris Raya menciptakan parlemen yang kuat. Lahir kembali sebelum Perang Dunia, dan kembali tenggelam, lalu lahir kembali se usai Perang Dunia II (Silitonga, 2020).

Dengan sejarah yang seperti itu, apakah yang dapat dikatakan tentang Demokrasi? Dengan lantang, Soekarno menyerukan agar “Indonesia mencari Demokrasi yang cocok untuk dirinya sendiri, dan jangan mencontoh Demokrasi dari Barat”. Kalau begitu, dapat dikatakan bahwa Demokrasi merupakan gagasan yang **Relatif**, **Kontekstual** dan (sesuai dengan warna) **Kultural** masyarakat setempat, sekaligus juga **Dinamis**.

Kita tidak dapat mengharapkan bahwa Demokrasi Indonesia harus sama dengan Demokrasi di Singapura, atau Turki, bahkan Mesir. Robert Dahl bahkan telah menunjuk bahwa Demokrasi di Argentina berbeda dari Chile, kendati kedua negara itu bertetangga.

Sejarah Demokrasi di Indonesia dimulai pada 1945, ketika Wakil Presiden Hatta mendorong kekuatan-kekuatan politik pada masyarakat berpartisipasi dalam Demokrasi yang sesuai dengan keadaan waktu itu. Hasilnya, timbullah kudeta pertama Juli 1946, yang mana kekuatan Sosialis tidak percaya pada kekuatan Kapitalis.

Selanjutnya, Indonesia menunjukkan sikap bersahabat pada Demokrasi, secara khusus pada Amerika Serikat, untuk menggalang dukungan atas kemerdekaan. Hal yang diharapkan tercapai, tetapi Indonesia harus membayar biaya perang, dan itu berarti Soekarno tunduk pada Kapitalisme Barat yang mengatasnamakan Demokrasi.

Pada sepanjang 1950an, kembali terjadi kontradiksi pada Demokrasi. Setelah Soekarno memimpin sendiri, proklamator menerapkan Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*). Dan internasional juga memulai *Cold War*. Kelompok Komunis menyebutkan Demokrasi sepenuhnya harus bersifat kerakyatan (*people*). Tetapi kelompok Kapitalis percaya bahwa Demokrasi merupakan sistem kerjasama antara Rakyat (*people*) dan Negara (Feith, 2006).

Tetapi Soekarno sendiri lebih mendekat pada Negara-negara Komunis, sementara Perang Dingin sedang berlangsung. Suka atau tidak, Soekarno harus dibasmi supaya Negara sebesar Indonesia condong ke Barat. Skenario itu berhasil dan Indonesia mulai mengalami yang disebut Demokrasi Pancasila, dengan Orde Baru serta Kapitalisme Barat sebagai penopangnya.

Setelah kita membicarakan Demokrasi, Nasionalisme perlu dibicarakan dengan irama yang sama. Seperti diketahui. Nasionalisme ialah: (1) Kesetiaan tertinggi kepada Negara, (2) Kebanggaan pada Negara, (3) Keyakinan bahwa Negara dapat menciptakan hal-hal baik pada masyarakat dalam semua aspek yang telah diperhingkan dengan baik. Karena itu setiap warganegara di manapun menghadapi persoalan Nasionalisme dan bisa dihubungkan dengan *Civic Virtue*.

Pengertian Nasionalisme barusan jelas berbeda dengan pendapat filosof Perancis, Ernest

Renan, bahwa Nasionalisme berkaitan dengan masalah bangsa (yang terkait dengan masalah Negara) (Prawira & Maryati, 2019). Apa yang dijelaskan Renan tampak tidak aktual dan tidak lagi relevan saat ini, dan ditertawakan oleh para pengkritik Nasionalisme.

Pengertian Nasionalisme harus berangkat dari keadaan Negara sebagai entitas politik, ekonomi maupun kultural. Terutama karena sejak awal 1990an, banyak negara bermunculan, entah sebagai Negara baru maupun pecahan Negara lain. Tetapi dengan pengertian itu pula, Nasionalisme menjadi Ideologi yang otentik, dalam pengertian yang mengikuti perkembangan hubungan Negara – Masyarakat. Seperti apakah hubungan Negara – Masyarakat di negara tersebut? (termasuk bidang ekonomi, hukum, militer dan sosial budaya.)

Berkaca dari pengertian itu kita dapat mendeteksi hubungan Negara – Masyarakat pada masa Orde Lama, Orde baru dan Orde Reformasi, dan membandingkannya hingga mencapai kesimpulan. Pada Orde Lama, Negara Republik Indonesia sangat kuat pada bidang Politik dan Militer, tetapi lemah secara Ekonomi. Masyarakatnya juga lemah pada semua bidang. Sedangkan pada Negara Orde Baru terlalu kuat pada semua bidang, tetapi masyarakatnya justru dilemahkan. Sedangkan Negara Reformasi (khusus pada periode pemerintahan Ir. Joko Widodo), menguat secara ekonomi tetapi masyarakatnya melemah karena lebih banyak asal bicara.

Agama

Mengapa dalam catatan ini Agama masuk dalam pengertian Ideologi? Tidak lain karena dalam Agama selalu terkait 3 (tiga) unsur yang mengikat, yakni Dogma (doktrin), Imam dan Umat. Tanpa ketiga unsur itu, Agama tidak bisa dikatakan agama. Sedangkan ihwal beragama, manusia mewujudkan dalam 5 (lima) komponen, yakni Pengetahuan, Ibadah, Pengalaman, Penghayatan dan Pengamalan (Stark & Bainbridge, 2013). Mana lebih menonjol dalam manusia Indonesia?

Agama merupakan keyakinan kepada Tuhan YME. Tuhan merupakan “sesuatu” dalam pikiran dan perasaan manusia, sebagai realitas yang lebih besar dari dirinya. Manusia beragama selalu merasa dirinya terbatas, sehingga membutuhkan yang lebih besar dari itu. Seorang filsuf Perancis, Jean – Luc Marion, mengatakan Tuhan sebenarnya tidak bisa dihitung dan didefinisikan. Kalau dihitung, akan timbul konsekuensi yang lebih berat: apakah Satu? Satu sebagai jumlah, number atau hasil penghitungan. Selain itu, seorang filsuf Perancis lain menjelaskan bahwa Spiritualitas tidak harus meyakini keberadaan Tuhan. Tuhan mungkin berupa *Dzat*, seperti dikatakan oleh Agama Islam; tetapi pikiran manusia, tidak dapat tidak, selalu menggambarkan Tuhan sebagai pribadi. Dan kalau begitu, Agama menjadi “sejenis” humanisme. Sedangkan *Spirit* adalah semangat dan keteladanan yang bersumber dari sesuatu yang tidak diketahui manusia (Marion, 1995).

Kembali kepada Agama, yang disebut terakhir ini bertumbuh secara evolutif di dalam dan melalui Kebudayaan. Pernyataan ini boleh tak terbantahkan, karena manusia sendiri berkebudayaan. Dengan kata lain, dalam dan melalui manusialah, Agama maupun Tuhan dikenal dan diyakini.

Beberapa teori menjelaskan asal-usul Agama. Teori-teori tertentu menyerukan bahwa Agama berasal mimpi, atau roh nenek moyang, atau kepentingan manusia sendiri (totem dan magi). Sebuah teori lain mengatakan bahwa Agama berasal dari pengenalan atas *the Sacred* atau Sakral. Kalau tidak mengenal Sakral, manusia tidak akan beragama apapun (Cave, 1993). Sedangkan teori lain mengatakan, Agama berasal dari kehendak masyarakat, bahkan merupakan masyarakat itu sendiri.

Tetapi dalam teori yang dikemukakan Robert Bellah, Agama tidak hanya lahir oleh variabel-variabel Sosio-kultural dan Psikologis. Diungkapkannya, kelahiran Agama juga disebabkan *variabel* Kosmik dan *variabel* Biologis. (Kendati Psikologi dan Biologi masih dianggap serumpun, tetapi Bellah justru

membedakannya.) Dengan perpaduan itu, dapat dikatakan bahwa Agama sebetulnya lahir secara natural pada diri manusia. Pada jagad manapun, sejauh terdapat manusia, Agama juga akan muncul (Bellah, 2011).

Sehingga akhirnya pertanyaan yang timbul: bagaimanakah perkembangan Agama hingga menjadi sebuah Ideologi. Gagasan tentang supernatural sendiri baru lahir sekitar tahun 400/300 SM. Maka tidak dapat tidak, Agama sebagai Ideologi timbul pertama kali akibat pertentangannya melawan Sains, dan karena jumlah manusia semakin banyak kemudian membutuhkan pengaturan masyarakat, yakni Politik (Arif, 2020).

Di dalam Sains, perlawanan Agama banyak dijelaskan lewat penolakannya atas rasio, dan hanya mengutamakan supranatural. Agama seolah tak bisa dilawan dan selalu benar. Muncul juga apa yang disebut ‘cocokologi’. Pada akhirnya, pertanyaan tentang surga dan neraka juga akan dijawab sebagai ‘tempat terakhir’, meskipun tidak ada orang yang bersedia mendahului yang lain untuk menuju ke sana.

Budaya

Apakah Kebudayaan, sehingga layak disebut Ideologi? Mengikuti penjelasan umum, kita mengetahui bahwa Budaya berasal dari Budi, Daya dan *Cult* (menjadi kultural). Budi ialah cipta dan rasa manusia, sedangkan Daya merupakan karya atau hasil usaha manusia. Lalu *Cult* sendiri merupakan serat-serat yang mendukung hidup manusia, seperti udara, air dan tanah. Dari serat-serat itulah manusia mengembangkan diri, sekaligus berkreasi atas ciptaanya, termasuk Teknologi sebagai ‘anak kandung’ Rasionalisme (Tucker, 1978).

Tidak hanya itu, Budaya juga berarti kebiasaan yang menjadi tingkah laku atau sikap mengenai ihwal sesuatu. Mungkin awalnya sikap dimaksud muncul spontan, tetapi lambat laun menjadi konsisten dan berusaha dipertahankan serta menjadi kebiasaan. Banyak bicara ataupun sedikit bicara merupakan budaya karena menjadi

kebiasaan. Pula dengan kebiasaan memakai barang-barang tanpa berpikir, ataupun menganggap setiap elemen rumah sama saja (dari teras hingga kamar mandi). Begitu juga dengan sulitnya disiplin saat menghadapi Pandemi *Covid-19*.

Apabila sudah menjadi kebiasaan dan dipertahankan, suatu budaya sulit berubah. Individu akan menyebutnya benturan budaya dan *turbulence*, sebagai situasi kacau dan sulit dikendalikan. Misanya manusia Batak tidak boleh menikah dengan penganut sesama marga. Mengapa demikian? Bila hal itu terjadi, dikhawatirkan akan muncul dampak yang negatif karena melakukan *incest*, meski relasi semarga terjadi pada generasi terdahulu. Maka kedua pihak tersebut disarankan keluar kampung atau tidak berinteraksi dengan manusia Batak.

Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, juga menjadi suatu budaya di Indonesia, meski atas nama Kebebasan. Tetapi hal itu sudah dilakukan banyak orang. Bagi yang konsisten tidak melakukan, menilai bahwa hubungan seksual mempererat kasih sayang karena didahului komitmen. Hal itu juga menegaskan bahwa pelaku yang konsisten adalah bagian dari masyarakat Kolektif. Tetapi bagi yang melakukan, hubungan seksual sebelum menikah menjadi penanda bahwa tubuh adalah properti pribadi, yang secara bebas melakukan apapun. Dengan kata lain, hal itu merupakan konsekuensi dari Individualisme yang dianut seseorang.

Pancasila

Pancasila (*The Five Principles*) merupakan Ideologi Negara sekaligus Ideologi Bangsa Indonesia. Dikatakan bahwa Soekarno menggali Ideologi tersebut dari bumi Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan kondisi alamiah yang tertanam dalam diri setiap manusia Indonesia sejak lama, dan Soekarno hanya 'menggali'. Ideologi itu bukanlah dari pikiran Soekarno semata.

Melalui tulisan-tulisannya, disertai dengan ucapan sendiri, Soekarno mengatakan bahwa

dirinya bukan seorang Komunis (Edman et al., 2005). Bahkan dia sangat percaya kepada Allah SWT dan tidak ada pembuktian apapun untuk mengatakan dirinya seorang Komunis. Tetapi dirinya sangat getol dengan Persatuan Indonesia. Sebagai seorang *solidarity maker*, tidak ada alasan baginya untuk tidak mempertahankan persatuan. Karena itu Soekarno sangat bersikukuh supaya Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia, dan tidak bersedia untuk membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Kembali pada Pancasila, sebagai Ideologi yang terdiri dari elemen-elemen penting bagi keindonesiaan, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah hingga keadilan. Tidak heran jika beberapa pendapat menyebutkan bahwa Pancasila merupakan cita-cita dasar setiap manusia di dunia. Namun demikian, apakah Pancasila telah menjadi dasar perilaku manusia Indonesia.

Hal pertama yang harus diingat ialah bahwa sebagai dokumen ideologis, Pancasila merupakan dokumen Negara. Bukan dokumen pribadi, kelompok atau dokumen agama manapun (Al-Farisi, 2019). Begitu pula tafsir atas Pancasila, harus disesuaikan tafsir dan kepentingan Negara, yakni Republik Indonesia. Dengan kata lain, tidak dimungkinkan memberi tafsir yang sesuka hati atas Pancasila, atau tafsir sesuai kepentingan kelompok tertentu.

Mengenai ketuhanan, disebutkan Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang percaya pada Tuhan. Kondisi Antropologis, Sosiologis maupun alamiah Indonesia, semua mengarah pada keyakinan terhadap Tuhan. Begitupun dengan sejarah Indonesia sendiri, diyakini sebagai berkat dari Tuhan. Tetapi Sila-I itu tidak menyebutkan 'agama', sehingga keyakinan kepada Tuhan YME tidak bergantung kepada agama (manapun).

Karena itu pengertian Esa dalam catatan 'Yang Maha Esa' adalah mutlak ataupun absolut. Cara beragama manusia Indonesia memang berbeda-beda dan nyaris tidak bisa disamakan. Karena itu Negara juga tidak mengatur cara beragama. Cukuplah dikatakan bahwa Negara

mengakui ketuhanan yang mutlak, dan manusia Indonesia seharusnya demikian juga. Termasuk jika dalam hati manusia Indonesia muncul ketidak-yakinan atas Tuhan, Negara tidak dapat mendeteksi satu-persatu. Namun apabila dirinya tinggal di Indonesia, terutama secara Sosiologis, tidak ada alasan untuk tidak meyakini.

Begitupun dengan kemanusiaan. Secara ajeg harus dikatakan bahwa Humanisme ialah keyakinan bahwa manusia ~ dengan seluruh otentisitas dirinya ~ terutama akal budi, dapat menyelesaikan seluruh persoalan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak dapat seperti itu, manusia akan menyerahkan kepada kuasa Tuhan, sebagai pemegang kuasa tertinggi tinimbang dirinya.

Masih terkait kemanusiaan, Sila-II juga menyingung persoalan identitas sekaligus keadilan dan keadaban. Mengenai identitas, kebudayaan merupakan *roots*, tetapi bicara identitas sebagai *roads* berarti pengalaman (Sugiharto, 2019). Perjalanan hidup manusia adalah identitas otentik yang membentuk dirinya. Sedangkan keadilan merupakan penghargaan atas cara dan sikap yang sama pada setiap manusia. Lalu keadaban ialah bertumbuhnya *sense* pada diri manusia untuk mengendalikan diri, sekaligus beretika.

Pada Sila-III, yakni Persatuan Indonesia, terlihat mudah diucapkan tetapi sukar dilaksanakan. Betapa tidak, para supporter sepakbola pada masing-masing klub lebih suka mendukung tim daerah asalnya tinimbang Tim Nasional. Selain itu, pada masa pilpres 2019 yang lalu, kita terjebak pada upaya saling mengejek atau menjelek-jelekkan. ‘Cebong’ dan ‘Kampret’ menjadi penanda bahwa persatuan memang sulit direalisasikan.

Mahasiswa pernah mengatakan di kelas, bahwa Generasi Milenial seperti dirinya memang tidak pernah mendapat pengajaran bagaimana cara bersatu. Maka ketika media sosial hadir membuka ruang yang lebih terbuka, tindakan mengejek / menjelek-jelekkan itu juga semakin terbuka. Dari situ muncul pertanyaan: manakah lebih dulu, persatuan atau Indonesia.

Beranjak pada Sila-IV, manusia Indonesia diajak mendiskusikan kondisi Rakyat Indonesia selama 77 tahun kemerdekaan. Apakah orientasi bernegara sudah terarah pada persoalan Rakyat? Jika terasa belum maksimal, mengapa.

Dari pertanyaan itu, kita harus membuat distingsi antara Negara dan Rakyat, yang masing-masing berbeda orientasi serta kepentingan. Tetapi demikian, Rakyat harus tetap bekerja dan membangun kekuatannya tanpa tergantung pada Negara. Rakyat tidak boleh hanya merengek-rengok minta diperhatikan, atau memprotes cara-cara bernegara yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Pada titik inilah kita sedang membicarakan *Civic Virtue* dan *Civil Society*. *Civic Virtue* merupakan persoalan-persoalan sekitar ketaatan Rakyat pada Negara, sedangkan *Civil Society* adalah kemandirian serta keadaban Rakyat.

Dan akhirnya, pada Sila-V, dibicarakan mengenai Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia. Bukan berarti bahwa jika Negara adil, maka kemiskinan tidak ada lagi. Mengapa berbicara tentang kemiskinan? Sulitnya mendefinisikan keadilan dan keadilan sosial membuat manusia Indonesia sering menghubungkan keadilan dengan kemiskinan. Padahal kenyataannya, pada Negara kaya sekalipun kemiskinan tetap menyeruak. Jadi bagaimana.

Kemiskinan disebabkan manusianya. Kemiskinan secara psikologis, psiko-sosial dan kemiskinan akibat *Trickle Down Effect*. Sedangkan keadilan merupakan kondisi yang suka atau tidak harus diciptakan setiap individu (imperatif). Sementara Keadilan Sosial berarti tiap-tiap individu harus mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama, hanya jika dirinya mampu dan memanfaatkan kesempatan – peluang tersebut.

Sedemikian kita mendiskusikan Pancasila beserta tafsirnya yang disetujui Negara. Pada akhirnya kita harus mengatakan bahwa sebagai Ideologi dan juga Nilai-nilai, Pancasila dapat menjadi Ideologi internasional sekaligus Nilai-nilai universal. Seperti bunga di taman, mudah-

mudahan menjadi bunga paling menarik di antara yang lain. Perlu juga diingat, kita tidak akan mampu berbicara tentang Globalisasi dan dampak Internasionalisme, jika tanpa didahului Nasionalisme pada diri sendiri, yakni Pancasila.

Umpan Balik dan Refleksi

Kekesalan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pada 24 Mei 2022, perlu mendapat perhatian. Presiden mengungkapkan kekesalannya pada pemerintah daerah yang selalu lebih suka membeli barang-barang kebutuhan birokrasi melalui import, tinimbang membeli produk dalam negeri. Belanja pemerintah, dengan demikian, lebih banyak berorientasi ke luar tinimbang sebaliknya.

Pada kasus kedua, salah satu episode “Si Doel Anak Sekolahan”, menyatakan bahwa paman Si Doel merasa kesal pada Doel karena lebih mementingkan mesin buatan pribadi tinimbang membeli. Akhirnya Doel berhenti dari perusahaan pamannya, karena jika membeli mesin baru akan banyak pekerja mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). “Harusnya kamu mengikuti kepentingan pemilik pabrik, bukannya memikirkan para pekerja, Doel. Salah mereka sendiri, mengapa dulu tidak sekolah sehingga menjadi bodoh?” ujar paman Doel.

Kedua contoh di atas menjadi gambaran manusia Indonesia yang teorinya telah digambarkan cukup panjang pada uraian di atas. Tulisan ini terfokus pada soal Ideologi, yakni konsentrasi kesadaran manusia, mulai dari tujuan hidup, visi dan misi, sekaligus tindakan yang terarah pada kesadaran dimaksud. Kesadaran itu, secara sederhana ialah “hidup yang lebih baik”, baik secara pribadi maupun sosial. Dengan demikian Ideologi merupakan kontrol hidup manusia, terutama pada masyarakat. Tanpa kontrol, manusia bebas melakukan apapun sesuka hati dan tidak terarah.

Pada gilirannya, catatan ini sepertinya searah dengan perspektif Mochtar Lubis tahun 1977 (Pidato Kebudayaan, 6 April), yakni mengaburkan pandangan positif tentang manusia Indonesia, dan hanya menjelaskan keburukan.

Seolah karena hal itu manusia Indonesia tidak bisa maju dan modern (Lubis, 2013). Namun, untuk apa menjelaskan hal-hal baik? Kondisi negatif justru dibutuhkan sebagai cermin. Kedua, para pembaca mungkin menebak bahwa tulisan ini terlalu optimis bahwa Ideologi dapat membawa manusia pada konsenstrasi dan kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi sangat wajar pada masa sekarang (paruh II abad XXI), manusia tidak lagi membutuhkan Ideologi. Apalagi teknologi makin berkembang dan hidup manusia makin dinamis. Globalisasi muncul dimana-mana, termasuk pada ruang privat.

Tetapi dapat dikatakan bahwa justru pada masa seperti itu, Ideologi semakin juga dibutuhkan, tanpa bersandar pada optimisme ataupun pesimisme. Dalam posisi sekarang ini, seperti ditegaskan, Kapitalisme telah muncul sebagai pemenang persaingan Ideologi. Kapitalisme mengacu pada *self-interest* serta kebebasan pribadi menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Tetapi keduanya melahirkan banyak dampak negatif, terutama pada masyarakat Indonesia. Kelihatan demikian. Masyarakat terus bergerak dengan Teknologi dan kebebasan, bergerak secara dinamis. Tetapi dalam kapasitas pribadi, seseorang yang berasal dari masyarakat kolektif menuju individualis, sebenarnya terlalu rapuh dan amat mudah terbelah.

Berdasarkan Ideologi Merkantilisme, kita menyaksikan Negara sangat dominan, tetapi dengan konsekuensi bahwa Negara dapat mengintervensi atau menjajah Negara lain. Masyarakat dan pribadi-pribadi meniru dan mengikuti apa yang dilakukan Negara. Tetapi pada masa sekarang, Indonesia adalah sebuah negara yang anti-penjajahan dan kebebasan adalah hak segala bangsa. Selain itu, masyarakat tidak bisa meniru apa yang dilakukan Negara, justru lebih banyak mengkritiknya.

Kekesalan Presiden RI, Ir. Joko Widodo terhadap aparat daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya banyak diproduksi di dalam negeri, menjadi salah satu kebalikan

mental Merkantilisme. Dengan ‘memaksa’, pemerintah pusat menghendaki agar APBD tidak dipakai untuk melakukan impor, terutama dalam kondisi mendekati perang seperti sekarang ini.

Melalui Ideologi Kapitalisme, kita percaya bahwa kreatifitas individu sekaligus kebebasan, merupakan dua hal yang berjalan serentak. Sedangkan kebebasan diiringi tanggung-jawab, maka kreatifitas bersandar pada rasio maupun aktifitas tiada henti. Tetapi manusia Indonesia adalah orang-orang kolektif, sehingga keduanya tidak terlalu diharapkan. Bahkan sering terdengar bahwa Bangsa Indonesia merupakan peramu yang kreatifitasnya mengarah pada ramuan itu. Apakah itu sebuah kreatifitas.

Sedangkan dari Ideologi Sosialisme, kita telah berkaca dari Uni Sovyet dan juga Negara-negara Skandinavia. Ekonomi Sovyet runtuh pada dekade 1980an, sedangkan perekonomian Skandinavia justru membutuhkan intervensi Negara, dengan pengenaan pajak tinggi, karena masyarakat juga berkreatifitas tinggi. Kondisi itu tidak mungkin diharapkan di Indonesia, yang hanya dapat memakai barang-barang teknologis, tetapi bukan untuk kreasi sosial.

Di atas sudah diuraikan pula, bagaimana Tanam Paksa mengakibatkan beberapa mentalitas pada diri manusia Indonesia, bahkan hingga sekarang, Abad XXI. Salah satu-nya adalah terlalu banyak *Complain* untuk hal-hal yang tidak berdasar dan remeh-temeh. Selain itu, harus disebutkan pula betapa manusia Indonesia sulit menabung, dan merasa cepat puas untuk hal-hal yang tidak diperoleh. Bukankah menabung bagian dari sikap terhadap uang dalam Kapitalisme.

Tidak salah jika Kapitalisme di Indonesia adalah Kapitalisme yang hanya mampu menjadi pasar dan pengguna produk-produk Teknologi. Pada Ujian Tengah Semester beberapa bulan lalu, saya bertanya mengapa manusia Indonesia keberatan jika Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia terlalu banyak dan membosankan. Tetapi kurikulum Ilmu-ilmu Alam Indonesia justru tidak memberi insentif yang cukup bagi lahirnya berbagai kreasi sosial di Indonesia. Para

mahasiswa mayoritas menjawab hal itu terjadi karena Ilmu-ilmu Sosial lebih banyak berisi teori ataupun konsep, sedangkan aplikasinya kurang terbukti, seperti maraknya korupsi.

Saya telah mengumpulkan 762 jawaban Responden melalui *Google Form*, hasilnya sebagai berikut : Hanya 24% Responden menjawab Ideologi penting bagi masyarakat Indonesia. Berarti 76% menganggap tidak terlalu penting. Ideologi, menurut 86% Responden, harus berkaitan dengan pekerjaan. Hanya 7% menilai Ideologi terkait dengan Pengetahuan dan Sikap dalam kehidupan. Hanya 31% Responden menyatakan Ideologi yang diterima pada pelajaran sekolah, sangat berguna. Tetapi 68% Responden menyatakan bahwa kegunaan tersebut terkait dengan soal beragama. Selain itu, 72% Responden menyatakan bahwa Teknologi tidak terkait dengan Ideologi, hanya 14% Responden menjawab sebaliknya

Ideologi dibutuhkan karena 26% Responden menjawab Indonesia terlalu besar dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural. Sedangkan 71% Responden menjawab karena tingkat pendidikan Indonesia semakin maju. Fakta ini membingungkan karena korelasi antara tingkat pendidikan tidak ekuivalen dengan kegunaan Ideologi. Dan akhirnya, bahwa Ideologi lebih kepada tujuan hidup, visi dan misi individual saja, tidak perlu kolektif, hanya dijawab 54% Responden. Mungkin karena itulah, Pancasila dianggap bukan sebagai Ideologi bangsa, meskipun pertanyaan tersebut tidak eksplisit.

Pada akhirnya harus dikatakan bahwa sosok manusia Indonesia memang ramah, banyak tertawa dan rajin tersenyum. Selain itu, harus dikatakan bahwa di Indonesia juga terlalu banyak korupsi, mulai dari recehan hingga bantuan sosial. Tetapi harus dikatakan bahwa pemerintah sesungguhnya berasal dari masyarakat sendiri. Orang-orang yang duduk dalam pemerintahan saat ini, dulunya adalah masyarakat, yang terpilih selama 5 (lima) tahun dalam kursi kekuasaan. Dengan kata lain, apabila *government criticis* selalu diarahkan pada pemerintah, masyarakat sedang mengkritik dirinya sendiri.

Tetapi isyarat yang diuraikan *Civil Society* harus nyata dalam sikap formal maupun informal. *Civil Society* merupakan Demokrasi yang sesungguhnya karena tanggungjawab empirik muncul pada masyarakat atau Rakyat. Mulai dari isyarat dari John Locke, Adam Smith, George Hegel, Habermas, Soekarno, M. Hatta, maupun MR. Soepomo. Sejauh ini, masyarakat Indonesia, terlalu jauh dari syarat-syarat tersebut.

Selama 32 (tiga puluh dua) tahun kekuasaan Orde Baru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan tidak ditujukan untuk memperbaiki mutu pendidikan, sehingga manusia Indonesia memang tidak mungkin berbicara mengenai kualitas, tetapi hanya kuantitas. Termasuk dalam iklim Demokrasi sejak dekade 1990an. Soekarno sendiri telah mengatakan agar “Indonesia mencari sosok Demokrasi yang tepat untukmu”.

Jika Pancasila hanyalah ide penuntun dan bukan pengatur, maka catatan ini harus mengatakan Pancasila bukanlah keduanya, tetapi sebagai pengontrol dan pengendali. Perubahan Sosial sedang terjadi saat ini di Indonesia ~ karena Pandemi *Covid-19* serta perubahan iklim ~ dan apakah yang bisa diharapkan dari masyarakat tanpa Ideologi?

Kesimpulan

Apa yang diuraikan dalam catatan ini mungkin terlalu banyak dan terlalu luas. Tetapi sejauh ini belum ada tulisan yang mengulas persoalan ideologi di Indonesia. Sedangkan untuk mendeteksi masyarakat, dapat kita lakukan dengan memperhatikan respon, reaksi maupun kebiasaannya. Dalam hal ini masyarakat Indonesia bukan *The Social* yang biasa berpikir kompleks dan detail, apalagi mementingkan Ideologi.

Dalam rentang waktu 1978-1989, Indonesia boleh jadi sangat merasakan Ideologi Orde Baru merasuki diri manusia Indonesia. Masa itu ~ dapat dikatakan ~ adalah ketika Ideologi bersemayam dalam manusia Indonesia, dan Pancasila menjadi Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia yang dihargai. Pada masa itu, beberapa pihak menghendaki supaya Presiden Soeharto turun dari kekuasaan, terutama karena pemilu 1977, 1982 dan 1987 telah sukses. Tetapi setelah itu pula Komunisme runtuh dan dunia lebih terbuka terhadap Demokrasi.

Dengan munculnya situasi-situasi tersebut, ditambah Modernisasi pada dekade 1990an, masyarakat Indonesia lebih terhisab pada Kapitalisme, tetapi tanpa dasar yang kuat, apalagi memadai.

BIBLIOGRAFI

- Al-Farisi, L. S. (2019). Harmonisasi Pancasila Dan Islam. *Aspirasi*, 10(1), 1–18. [Google Scholar](#)
- Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14. [Google Scholar](#)
- Becker, J. A. (1999). Glasnost vs. Freedom Of The Press. In *Soviet And Russian Press Coverage Of The United States* (Pp. 37–64). Springer. [Google Scholar](#)
- Bellah, R. N. (2011). *Religion In Human Evolution: From The Paleolithic To The Axial Age*. Harvard University Press. [Google Scholar](#)
- Cave, D. (1993). *Mircea Eliade's Vision For A New Humanism*. Oxford University Press. [Google Scholar](#)
- Dullien, S., Herr, H., & Kellermann, C. (2013). *Capitalismo Decente: Una Contribución Progresista Al Debate Sobre La Reforma Económica Mundial*. Nueva Sociedad, 243, 18. [Google Scholar](#)
- Edman, P., Yulianto, D. P., & Afiyanti, W. (2005). *Komunisme Ala Aidit: Kisah Partai Komunis Indonesia Di Bawah Kepemimpinan Dn Aidit 1950-1965*. Center For Information Analysis. [Google Scholar](#)
- Feith, H. (2006). *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*. Equinox Publishing. [Google Scholar](#)
- Gibbons, M. T. (2002). *Tafsirpolitik: Telaah Hermeneutis Wacana Sosial-Politik Kontemporer* (Diterjemahkan Oleh Ali Noer Zaman, Dari Judul Asli: *Interpreting*

- Politics). Yogyakarta: Penerbit Qalam. [Google Scholar](#)
- Heilbroner, R. L. (1986). Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi, Terjemah. Boentaran, Jakarta: Ui Press. [Google Scholar](#)
- Lubis, M. (2013). Manusia Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [Google Scholar](#)
- Marion, J.-L. (1995). God Without Being: Hors-Texte. University Of Chicago Press. [Google Scholar](#)
- Mcvey, R. T. (2019). The Rise Of Indonesian Communism. Cornell University Press. [Google Scholar](#)
- Pipes, R. (2003). Communism: A History (Vol. 7). Modern Library. [Google Scholar](#)
- Prawira, A., & Maryati, I. (2019). Analysis Of High School History Grade Xi Using Ernest Renan's Nationalism Approach. Historika, 22(2), 1–20. [Google Scholar](#)
- Shiraishi, S. S. (2001). Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia Dalam Politik. Kepustakaan Populer Gramedia. [Google Scholar](#)
- Silitonga, S. G. J. (2020). Demokrasi Dan Civic Virtue (Indonesia 1998-2020). Pt Kanisius.
- Smith, A. (1759). The Theory Of Moral Sentiments, London: A. Millar (1790. Sixth Edition). [Google Scholar](#)
- Smith, A. (1776). 1937) The Wealth Of Nations. New York: Modern Library. [Google Scholar](#)
- Stark, R., & Bainbridge, W. S. (2013). Religion, Deviance, And Social Control. Routledge. [Google Scholar](#)
- Sugiharto, B. (2019). Kebudayaan Dan Kondisi Post-Tradisi: Kajian Filosofis Atas Permasalahan Budaya Abad Ke-21. Pt Kanisius. [Google Scholar](#)
- Tucker, R. C. (1978). The Marx-Engels Reader. [Google Scholar](#)
- Turner, A. (2003). Capitalism And The End Of History. World Economics, 4(1), 15–32. [Google Scholar](#)
- Wolf, M. (2007). Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan. Yayasan Obor Indonesia. [Google Scholar](#)

Copyright holder :

Samson Ganda J. Silitonga (2022).

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

